

Apakah elemen “Kuasa” masih relevan dalam “Pemberdayaan” Perempuan? Pandangan Aktivistis Perempuan di Indonesia terhadap istilah “Pemberdayaan”

Sri Wiyanti Eddyono ¹

Pengantar

Tulisan ini memaparkan bahwa ada pemaknaan yang berbeda terhadap “empowerment” oleh para aktivis perempuan dimana pemaknaan tersebut tidak lepas dari konteks sosial dan politik yang berkembang. Terjadi proses adaptasi terhadap istilah ‘empowerment’ ke “pemberdayaan” dimana elemen “kuasa” dan “perubahan kuasa” menjadi kabur. Proses adaptasi ini didukung oleh konteks sosial dan politik termasuk di tingkat internasional. Adaptasi istilah “pemberdayaan” tidak lagi dipertanyakan dan diterima apa adanya. Tulisan ini belum sampai pada analisa dampak dari proses “penerimaan” tersebut terhadap implementasi program pemberdayaan yang dilakukan oleh aktivitas perempuan di Indonesia.

Dalam kerangka penelitian WEMC, definisi “empowerment” adalah suatu proses peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan-keputusan otonom yang mentransformasikan hubungan kekuasaan yang tidak diinginkan. Sejalan dengan definisi umum ini, “women’s empowerment” menurut WEMC adalah peningkatan kemampuan untuk mempertanyakan, menentang, dan akhirnya mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan yang terjenderkan yang tidak diinginkan yang seringkali dilegitimasi dengan mengatasnamakan budaya.² Tulisan singkat ini disusun sebagai kontribusi penulis terhadap konsepsi pemberdayaan dalam berbagai konteks khususnya di empat Negara.³

¹ Disusun ulang berdasarkan pendokumentasian yang dilakukan oleh Leonie Dian Anggrasari

² Lihat secara lengkap dalam Kerangka Penelitian WEMC, “*Perempuan Memberdayakan Diri Mereka Sendiri Sebuah Kerangka Kerja yang Mempertanyakan dan Merubah*” halaman 2.

³ Merespon hal tersebut SCN WEMC mengajak beberapa pihak (yang awalnya adalah narasumber penelitian) untuk merancang diskusi secara reguler yang bermaksud untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas para aktivis perempuan terutama kapasitas menganalisa situasi perempuan di akar rumput melalui proses refleksi bersama. Diskusi ini digelar sejak bulan Juni 2009 hingga sekarang di Yogyakarta. Tim sepakat untuk menyelenggarakan setidaknya satu tahun dan akan ada evaluasi terhadap proses yang sudah berjalan. Dari proses diskusi yang berjalan saya melakukan dokumentasi, identifikasi dan analisa terhadap bagaimana pandangan para aktivis perempuan dalam terkait dengan isu pemberdayaan perempuan. Data yang saya gunakan hampir semua di dapat dari setiap proses diskusi, namun tidak terbatas pada diskusi di Yogyakarta. Secara spesifik saya menggunakan dokumentasi atas diskusi pendalaman tentang kerangka penelitian WEMC yang dilakukan pada bulan Oktober 2009. Tema tersebut didiskusikan ulang oleh Tim setelah pernah didiskusikan pada pertemuan pertama pada bulan Juni 2009 karena tim penyelenggara merasa penting memperkuat pemahaman tentang pemberdayaan apalagi masukan dari peserta diskusi agar kerangka WEMC disarankan menjadi kerangka diskusi rutin selama satu tahun. Sumber utama lain adalah diskusi dengan LSM Perempuan

Empowerment = Pemberdayaan?

Istilah “Empowerment” sudah sangat lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Pemberdayaan”. Sementara “women empowerment “ diterjemahkan sebagai “Pemberdayaan Perempuan”. Jarang ada yang mempertanyakan ulang apakah istilah “Pemberdayaan” sudah tepat atau tidak. Istilah tersebut diterima begitu saja oleh banyak kalangan, termasuk para aktivis perempuan. Padahal menurut Wee, “Pemberdayaan” berasal dari kata “Daya (tenaga)” yang mempunyai makna yang berbeda dan dilematis. Kata “power” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “kuasa” bukan “daya”. Dengan menggunakan istilah “pemberdayaan”, akan mengaburkan elemen penting dari pemberdayaan yaitu upaya menstransformasikan relasai kuasa.⁴

Mengapa istilah “pemberdayaan” yang digunakan? Sampai saat ini peneliti masih mengidentifikasi bagaimana prosesnya sehingga istilah “pemberdayaan” menjadi istilah untuk mengartikan “Empowerment”. Walaupun istilah “pemberdayaan” telah menjadi wacana di kalangan aktivis gerakan perempuan pada era tahun 1990an, namun ketika peneliti bertanya kepada beberapa aktivis perempuan tidak ada yang tahu kapan dan siapa yang menggunakan istilah tersebut pertama kali. Melly G. Tan pada tahun 1997 menuliskan bahwa istilah “pemberdayaan” yang digunakan untuk merujuk kata “empowerment” bukan istilah yang baku. Disamping istilah ‘pemberdayaan’ Tan menyebutkan pula istilah “kemampuan” untuk menterjemahkan “pemberdayaan”.⁵ Namun, setelah kejatuhan rezim Suharto, secara resmi Negara telah menggunakan istilah “pemberdayaan perempuan” pertama kali pada dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang kemudian dituangkan ke dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) tahun 2000-2004.⁶

Dalam wacana yang berkembang tentang “Pemberdayaan” pada era tahun 1990an Tan melihat bahwa “empowerment” diperkenalkan dan menjadi wacana yang masuk ke Indonesia dipengaruhi

yang bernama YASANTI pada bulan Desember 2009 yang secara khusus meminta penulis untuk membawa materi Kerangka Perempuan Memberdayakan Dirinya pada diskusi untuk penguatan kapasitas internal organisasi mereka³ dan diskusi-diskusi yang terjadi dengan para peneliti lapangan WEMC yang juga adalah aktivis perempuan yang aktif dalam organisasi perempuan (LSM atau ormas).

⁴ Kerangka Penelitian WEMC, “*Perempuan Memberdayakan Diri Mereka Sendiri Sebuah Kerangka Kerja yang Mempertanyakan dan Merubah*”

⁵ Tan, Mely G, “Perempuan dan Pemberdayaan” dalam Notosusanto, Smita dan Poerwandari, E Kristi (edit), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita UI-Kompas-Obor, 1997.

⁶ Lihat Sabaniah dkk, “Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan; Ide dan Konsep Pemberdayaan Perempuan oleh Pemerintah Indonesia”, WEMC, 2009.

oleh gerakan perempuan di dunia internasional yang menguat pada era 1980an. Merujuk pada istilah dan konsep “empowerment” oleh Batliala Srilatha (1994),⁷ istilah “power” dalam “empowerment” dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi “kekuasaan” atau “kekuatan” dimana kemudian “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai proses untuk “...menantang hubungan kekuasaan yang ada, dan memperoleh penguasaan yang lebih besar atas sumber-sumber kekuasaan”⁸. Dalam konteks perempuan; maka “empowerment” menantang ideologi patriarki yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi jendar dan ketidaksamaan sosial. Namun Tan menganggap bahwa konsep “empowerment” tersebut tidak begitu tepat dalam konteks Indonesia, sebab “women empowerment” terlalu menekankan dimensi kekuasaan dalam arti pengambilan kekuasaan oleh kaum perempuan. Walaupun demikian Tan setuju bahwa proses perubahan struktur dan pranata dalam masyarakat menjadi sangat penting. Oleh karena itu Tan melihat bahwa “pemberdayaan perempuan” dalam konteks Indonesia lebih penting menekankan pada proses untuk mendesak pembagian kekuasaan menuju posisi setara, representasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Tan menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya keadaan dan posisi perempuan, tapi termasuk pula memperkuat ketahanan keluarga dan relasi perempuan dengan lingkungannya dengan menekankan aspek persamaan tanggung jawab untuk kesejahteraan.

Tampaknya memang ada kecanggungan untuk melihat isu pemberdayaan perempuan sebagai upaya transformasi kekuasaan perempuan. Ada ketakutan bahwa proses “pemberdayaan” perempuan akan menjadikan perempuan mengambil alih kekuasaan sesuatu yang tidak terlalu lazim dan konteks budaya yang sangat kuat nilai-nilai patriarkinya. Inilah yang mungkin menjadi alasan bahwa istilah “pemberdayaan” menjadi lebih nyaman dipakai oleh banyak pihak dan kemudian menjadi istilah yang dibakukan oleh Negara.

Tidak saja Tan, tapi beberapa narasumber yang ditemui memang merasa bahwa bicara “kuasa” dan “mengubah relasi kuasa” antara laki-laki dan perempuan secara eksplisit dalam konteks pemberdayaan--apalagi di tingkat komunitas adalah sangat dihindari. Hal ini tak lain karena pertimbangan taktis. Ada ketakutan bahwa jika persoalan kuasa di’utak-atik” malah akan kontraproduktif; membuat masyarakat antipati terhadap program atau gerakan yang sedang

⁷ Tan, Mely G sesungguhnya merefer pada Srilatha Batliwala, 1994, “The Meaning of Women’s Empowermen; New Concepts from Action” dalam Gita Sen, ed.all. *Population Policies Resconsidered Health, Empowerment and Rights*. New York: Internasional Women’s Health Coalition (IWHC).

⁸ Ibid.

dibangun.⁹ Ini termasuk kritik yang muncul terhadap para aktivis perempuan yang bergerak atau mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga di tingkat komunitas.¹⁰ Isu KDRT dianggap isu yang sangat sensitif di tingkat komunitas meskipun sangat strategis dikampanyekan di tingkat nasional. Isu tersebut akan membawa perempuan (isteri) berhadapan langsung dengan laki-laki (suami) dimana isteri dianggap sebagai korban dan suami adalah pelaku. Ketika awal masuk sudah mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga maka resistensi yang muncul dari kalangan laki-laki akan menghambat para isteri untuk terlibat dalam program-program pemberdayaan karena dianggap program yang ada tidak akan berguna bagi keluarga dan malah akan merusak harmoni keluarga. Tim WEMC- LSPPA di Gunung Kidul, misalnya, menemukan resistensi yang cukup besar dari masyarakat (termasuk aparat desa yang sebagian besar adalah laki-laki) terhadap program-program yang disusun oleh para perempuan penggerak PKK di komunitas untuk sosialisasi penghapusan KDRT.

Hal ini pula yang menyebabkan banyak aktivis perempuan yang merancang program pemberdayaan perempuan melalui program-program penambahan penghasilan perempuan atau isu-isu lain yang dianggap lebih mudah diterima. Asumsi yang dipakai adalah jika perempuan mempunyai penghasilan sendiri maka perempuan akan lebih punya posisi tawar dihadapan suami dan lingkungannya. Melalui isu yang dianggap lebih ‘soft’ (baca; yang lebih mudah diterima) target awalnya adalah menumbuhkan kepercayaan di tingkat masyarakat bahwa program yang ada dapat membantu komunitas dan baru kemudian isu yang lebih ‘kuat’ bisa diangkat. Asumsi tersebut bisa jadi benar, sebagaimana pengalaman pemberdayaan perempuan yang terjadi di Padang Pariaman, dimana seorang ibu yang mempraktekkan pengetahuan yang didapat dalam pelatihan pembuatan kripik pisang dengan berhasil mengembangkan usaha pembuatan kripik pisangnya --telah mengubah relasi kuasa antara ia dan suaminya dan antara ia dan anak laki-lakinya. Namun, banyak kasus, pengembangan program komunitas yang masuk melalui perempuan tidak berhasil sampai pada perubahan relasi kekuasaan sehingga program yang dirancang sebagai “jalan masuk” itu malah “tidak masuk-masuk”.¹¹

Tidak semua narasumber melihat bahwa pembahasan relasi kuasa perlu dihindarkan. Ada narasumber yang menyetujui bahwa elemen kuasa menjadi sangat penting dalam “pemberdayaan”. HS, misalnya melihat kata kunci dari “empowerment” adalah kontrol terhadap kekuatan. Saat

⁹ Disampaikan oleh Am.

¹⁰ Pandangan Vr, refleksinya terhadap upaya mengangkat isu KDRT di komunitas di Solo.

¹¹ Disampaikan oleh peneliti WEMC Padang.

perempuan memiliki kekuatan dan kontrol maka perempuan tersebut berdaya. Proses pemberdayaan perempuan kemudian terkait dengan upaya pemenuhan dan promosi hak, terutama hak sipil perempuan serta perlindungan perempuan.

“Pemberdayaan dalam Konteks Budaya Spesifik”

Ada kecenderungan elemen “kuasa” dan “perubahan relasi kuasa” dihindari diintrodusir secara eksplisit dalam konteks “pemberdayaan” dengan berbagai alasan terkait karena “tidak cocok dengan budaya setempat”. Menariknya, dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda; apa yang dianggap tidak cocok dengan budaya setempat sesungguhnya tidak jauh berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya; konsep perempuan yang menjaga harmoni (mengangkat isu kuasa sama dengan memecah harmoni), dan konsep perempuan yang tidak neko-neko (tidak macam-macam) atau “ora elok” (tidak baik) dalam budaya masyarakat Jawa sementara ‘ndak pantas’ (tidak sepatutnya) dalam konteks budaya masyarakat Minang.

Hal ini ditegaskan pula oleh Budi Wahyuni. Wahyuni melihat bahwa perempuan yang berdaya adalah perempuan yang dapat mengambil keputusan dengan segala resiko yang ada. Wahyuni menemukan bahwa pemahaman perempuan terhadap dirinya masih sangat dipengaruhi budaya gender yang sangat kuat yang kawin dengan budaya Jawa. Walaupun perempuan sering menegosiasikan kehendaknya kepada suami dan keluarganya, namun perempuan lebih banyak berkompromi. dengan lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, tempat bekerja dan masyarakat.¹⁶

Pemberdayaan yang seperti apa yang perlu dalam konteks yang demikian?

Pada umumnya hampir setiap narasumber menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses penguatan diri perempuan. Namun ada perbedaan tentang bagaimana proses penguatan itu terjadi di kalangan aktivis perempuan. Pendekatan pertama melihat bahwa proses pemberdayaan berasal dari diri sendiri—sementara ada yang melihat bahwa proses pemberdayaan adalah dari luar ke dalam dimana aktor pemberdayaan yang menjadi kunci dari proses pemberdayaan perempuan adalah pihak luar.

¹⁶ Presentasi tentang hasil penelitian tentang Negosiasi dan Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga pada produksi Kesehatan Reproduksi.dalam Diskusi Berseri Gender dan Pemberdayaan tanggal 19 Februari 2010

As, misalnya menekankan bahwa pemberdayaan adalah memaksimalkan dirinya sendiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak luar. Bantuan dari pihak luar yang diberikan berupa tambahan wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperluas jalan dan memaksimalkan untuk perubahan di dalam diri perempuan. As secara tegas melihat bahwa perempuan adalah aktor dari pemberdayaan itu. Disamping As, Hs mengkritik bahwa selama ini banyak yang mengartikan bahwa perempuan tidak memiliki daya sehingga perlu aktor. Seolah-olah aktorlah yang kemudian memberikan daya terhadap perempuan. Yang seringkali mengklaim menjadi aktor pemberdayaan adalah pemerintah, masyarakat, NGO dan donor.¹⁸

Disisi lain, masih ada yang melihat bahwa pemberdayaan adalah yang kuat memperdayakan yang lemah. Dimana sebagaimana yang dikritik Hs, ada proses klaim terhadap peran LSM bahwa LSM memberdayakan masyarakat; perempuan miskin kota, miskin desa, kelas menengah, Donor memberdayakan LSM, dan pemerintah adalah memberdayakan perempuan yang termarjinalkan.¹⁹ Proses pemberdayaan oleh narasumber ini masih melihat bahwa proses pemberdayaan adalah proses yang dari luar ke dalam dimana aktor utamanya adalah bukan pada diri perempuan.

Ni menekankan, “empowerment” adalah proses dari tidak berdaya menjadi berdaya walaupun Ni melihat bahwa proses pemberdayaan perempuan tidak mudah. Perempuan seringkali mengalami situasi pasang surut (*up and down*). Terkadang perempuan tahu apa yang harus ia lakukan menghadapi situasi yang menindasnya tapi saat dipertanyakan oleh lingkungan atau bahkan ketika lingkungan menganggap apa yang dilakukan tidak benar (ia ditolak), maka “empowerment” perempuan menurun (*down*). Pandangan Ni sesungguhnya sejalan dengan konsep yang ada dalam kerangka penelitian WEMC dimana proses “empowerment” perempuan tidak terjadi secara linear. Dalam konteks demikian Ni melihat bahwa perlu ada ruang dan penciptaan ruang untuk berdialog. Walaupun hasil akhir dari proses dialog tersebut belum tentu mengubah relasi, tapi proses berdialog akan menjadi indikator untuk melihat bahwa perempuan mau *menchalange* situasinya.

Wahyuni melihat keterbatasan informasi--tempat dimana ia melakukan penelitian-- menyebabkan perempuan terbatas pilihannya sehingga penyediaan informasi atau pembukaan akses informasi untuk perempuan menjadi penting. Walaupun perempuan banyak yang mencoba menegosiasikan keinginannya --seperti keinginan ber KB yang lebih aman--pandangan suami yang tidak setuju adalah putusan akhir. Informasi yang tersedia dan diakses oleh perempuan di wilayah tersebut

¹⁸ Diskusi Berseri Gender dan Pemberdayaan tanggal 14 Agustus 2009

¹⁹ Diskusi Pendalaman Gender dan Pemberdayaan tanggal 2 Oktober 2009, tema “Kerangka Penelitian WEMC”

adalah informasi yang didapat oleh perempuan dari pada ulama yang masih sangat bias jender di Wonosobo yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan perempuan wajib mengikuti apa kata suami.

Melihat berbagai hal di atas sesungguhnya elemen “kuasa” dan “perubahan relasi kuasa” menjadi penting untuk sebuah definisi yang mengkerangkai “empowerment” termasuk dalam konteks Indonesia. Walaupun istilah yang lazim digunakan adalah “pemberdayaan” istilah ini harus dimaknai lebih luas sehingga menyentuh pada isu perubahan relasi kuasa yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dan dalam konteks relasi lainnya. Namun demikian, disadari bahwa strategi “empowerment” bisa jadi sangat beragam sesuai konteks. Jika strategi “empowerment” adalah dengan cara menggunakan bahasa yang lebih soft yakni “pemberdayaan” maka strategi tersebut perlu direfleksikan. Apalagi dalam konteks saat ini, ketika “pemberdayaan perempuan” sudah menjadi proyek yang besar yang didukung banyak donor, dimana pendekatan pragmatis dan cenderung oportunistik yang terjadi dalam mengejawantahkan program pemberdayaan, bahkan di kalangan pemerintah.²⁰ Khususnya sejak kejatuhan rezim Suharto, dalam era reformasi, begitu banyaknya proyek-proyek yang mengatasnamakan “pemberdayaan perempuan” yang kemudian menjadikan banyak “pekerja” perempuan yang menjalankan program “pemberdayaan perempuan”²¹. Istilah “pemberdayaan perempuan” dalam konteks yang ingin melunakkan arti demi kepentingan taktis’ bisa jadi akan semakin kehilangan akarnya. Program yang ada tidak akan efektif mengubah kondisi kesenjangan perempuan, khususnya di Indonesia yang berakar pada budaya patriarki di berbagai level, ranah dan bidang kehidupan.

Referensi;

Eddyono, Sri Wiyanti “Challenges that feminists face in alliance-building, both with other non-feminist women and other social movements in Indonesia, “WEMC 2010.

Leya Catleya, *Laporan Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia, Refleksi dari Kajian Mandiri, Partisipatif, dan Pembelajaran dari Konsultasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten*, UNDP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2006.

Sabaniah dkk, “Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan; Ide dan Konsep Pemberdayaan Perempuan oleh Pemerintah Indonesia”, WEMC, 2009.

²⁰ Leya Catleya, *Laporan Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia, Refleksi dari Kajian Mandiri, Partisipatif, dan Pembelajaran dari Konsultasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten*, UNDP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2006.

²¹ Wawancara dengan Dmr, 2010.

Tan, Mely G, “Perempuan dan Pemberdayaan” dalam Notosusanto, Smita dan Poerwandari, E Kristi (edit), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita UI-Kompas-Obor, 1997.

Wahyuni Budi, Power power Presentasi “Negosiasi dan Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga pada produksi Kesehatan Reproduksi” dalam Diskusi Berseri Gender dan Pemberdayaan tanggal 19 Februari 2010

Wee, Vivienne dan Shadeed Farida, *“Perempuan Memberdayakan Diri Mereka Sendiri Sebuah Kerangka Kerja yang Mempertanyakan dan Merubah”*, WEMC, 2008